

## **PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN ETIKA POLITIK**

**Suparman Mannuhung dan Andi Mattingaragau Tenrigau**

(Dosen Universitas Andi Djemma Palopo mzaid090609@gmail.com)

**Abstrak.** Artikel ini membahas tentang pengertian pendidikan Islam dan pengertian etika politik, urgensi etika politik, etika politik bagi kader partai politik dan nasihat politik untuk wakil rakyat. Pendidikan dalam pandangan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur serta sistematis untuk mensukseskan misi penciptaan manusia sebagai *abdullah* dan *khalifah* Allah di muka bumi termasuk di Indonesia kemudian Persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam pendidikan Islam, Pertama, politik itu dipandang sebagai bagian dari pemabahasan ajaran Islam, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar-dasar Islam. Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam pendidikan Islam, karena politik itu berhubungan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Bila hubungan antar masyarakat dan dan penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan ajaran-ajaran pendidikan Islam, maka yang akan muncul adalah kekacauan dalam sistem politik seperti adanya korupsi dan muncul anarki yang sangat dikecam oleh para ulama. Kekacauan dan anarki dalam suatu masyarakat dan negara dapat mengganggu sistem politik yang benar.

Kata kunci: *Peran Pendidikan Islam, Etika Politik*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik kualitas kehidupan maupun proes-proses pemberdayaannya (Maarif, 1996). Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut. Dalam konteks tersebut, maka kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia dewasa ini, sudah tentu tidak terlepas dari peran-peran pendidikannya. Dirahinya kemajuan ilmu dan teknologi yang dicapai bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi ini, telah merupakan akses produk suatu pendidikan, sekalipun diketahui bahwa kemajuan yang dicapai dunia pendidikan selalu di bawah kemajuan yang dicapai dunia industri yang memakai produk lembaga pendidikan.

Proyeksi keberadaan dan kenyataan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tentu tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraannya pada masa lampau juga. Pendidikan Islam pada periode awal (*masa Nabi saw*) misalnya, tampak bahwa usaha pewarisan nilai-nilai diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia agar terbebas dari belenggu aqidah sesat yang dianut oleh sekelompok masyarakat *elite Quraisy* yang banyak dimaksudkan sebagai sarana pertahanan mental untuk mencapai *status quo*, yang melestarikan kekuasaan dan menindas orang-orang dari kelompok lain yang dipandang rendah derajatnya atau menentang kemauan kekuasaan mereka.

Gagasan-gagasan baru yang kemudian dibawa dalam proses pendidikan Nabi, yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai keimanan baik secara individual maupun kolektif, bermaksud menghapus segala kepercayaan *jahiliyah* yang telah ada pada saat itu. Dalam batas yang sangat meyakinkan, pendidikan Nabi dinilai sangat berhasil dan dengan pengorbanan yang besar, *jahiliyahisme* masa itu secara berangsur-angsur dapat dibersihkan dari jiwa mereka, dan kemudian menjadikan *tauhid* sebagai landasan moral dalam kehidupan manusia.

Proses pendidikan yang dilakukan Nabi, yang sangat tertuju pada penanaman nilai aqidah (*ketauhidan*), keberhasilan yang dicapainya memang sangat ditunjang oleh metode yang digunakannya. Pada proses pendidikan awal itu, Nabi lebih banyak menggunakan metode pendekatan personal-individual. Dalam meraih perluasan dan kemajuannya, baru kemudian diarahkan pada metode pendekatan keluarga, yang pada gilirannya meluas ke arah pendekatan masyarakat kolektif (Suyata, 1992).

Pada era abad ke-20, pendekatan pendidikan Islam berlangsung melalui proses operasional menuju pada tujuan yang diinginkan, memerlukan model yang konsisten yang dapat mendukung nilai-nilai moral-spritual dan intelektual yang melendasinya, sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi. Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan manusia yang dipadukan dengan pengaruh lingkungan cultural yang ada, sehingga dapat mencapai cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia disegala aspek kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi, kondisi pendidikan Islam pada era abad ke-20, mendapat sorotan yang tajam yang kurang menggembirakan dan dinilai menyandang “keterbelakangan” dan julukan-julukan yang lain, yang semuanya bermuara pada kelemahan yang dialaminya. Kelemahan pendidikan Islam dilihat justru terjadi pada sektor utama, yaitu pada konsep, sistem, dan kurikulum, yang dianggap mulai kurang relevan dengan kemajuan peradaban umat manusia dewasa ini atau tidak mampu menyertakan disiplin-disiplin ilmu lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kenyataannya yang ada ini, memasukkan pendidikan Islam dalam klasifikasi yang belum dapat dikatakan telah berjalan dan memberikan hasil secara memuaskan. Hal ini mempunyai pengertian belum mampu menjawab arus perkembangan zaman yang sangat deras, seperti timbulnya aspirasi dan idealitas yang serba multi interes dan berdemensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang amat beragam, serta perkembangan teknologi yang amat pesat.

Melihat kenyataan ini, maka tak ayal lagi bahwa pendidikan Islam perlu mendapat perhatian yang serius dalam menuntut pemberdayaan yang harus disumbangkannya, dengan usaha menata kembali keadaannya, terutama di Indonesia. Keharusan ini, tentu dengan melihat keterkaitan dan peranannya di dalam usaha pendidikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, sehingga perlu ada terobosan seperti perubahan model dan strategi pelaksanaannya dalam menghadapi perubahan zaman.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis memberikan rumusan dalam artikel ini meliputi :

1. Apakah pengertian pendidikan Islam dan pengertian etika politik ?
2. Bagaimana Urgensi Etika Politik ?
3. Bagaimana Etika Politik Bagi Kader Partai Politik ?
4. Bagaimana Nasihat politik untuk wakil rakyat ?

## **PENGERTIAN PENDIDIKAN ISLAM**

Pendidikan dalam pandangan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur serta sistematis untuk mensukseskan misi penciptaan manusia sebagai *abdullah* dan *khalifah* Allah di muka bumi (Yusanto, 2001). Pendidikan harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hidup Islam. Sebagai bagian integral dari sistem kehidupan Islam, sistem pendidikan memperoleh masukan dari supra sistem, yakni keluarga dan masyarakat atau lingkungan, dan memberikan hasil/keluaran bagi suprasistem tersebut. Sementara sub-subsistem yang membentuk sistem pendidikan antara lain adalah tujuan pendidikan itu sendiri, anak didik (pelajar/mahasiswa), manajemen, struktur dan jadwal waktu, materi, tenaga pendidik/pengajar dan pelaksana, alat bantu belajar, teknologi, fasilitas, kendali mutu, penelitian dan biaya pendidikan.

Interaksi fungsional antar subsistem pendidikan dikenal sebagai proses pendidikan. Proses pendidikan ini didefinisikan Pannen dan Malati dalam buku *Program Applied Approach* (1996) sebagai proses transformasi atau perubahan kemampuan potensial individu peserta didik menjadi kemampuan nyata untuk meningkatkan taraf hidupnya lahir dan batin. Proses pendidikan dapat terjadi dimana saja. Berdasarkan pengorganisasian serta struktur dan tempat terjadinya proses tersebut, dikenal adanya pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Melalui proses ini diperoleh hasil pendidikan yang mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil pendidikan ini dikembalikan kepada supra sistem atau lingkungan. Di dalam lingkungan inilah, hasil pendidikan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan yang berlangsung dapat dibuktikan. Dari hasil pendidikan ditambah interaksi dengan lingkungannya, sistem pendidikan memperoleh umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pendidikan.

Dari gambaran di atas diketahui bahwa kesinambungan tujuan pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan sekolah (formal) sangatlah penting, dan itu akan mempengaruhi kemampuan anak didik dalam menjalani proses pendidikan. Untuk menjaga kesinambungan proses pendidikan, penjabaran capaian tujuan pendidikan melalui kurikulum pendidikan, dengan guru/dosen dan budaya pendidikan yang mendukung menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Kurikulum pendidikan Islam sendiri sangatlah khas, *unique*. Tampak pada penetapan tujuan/arah pendidikan, unsur-unsur pelaksana pendidikan serta asas dan struktur kurikulum.

## **PENGERTIAN ETIKA POLITIK**

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Jadi, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika tidak sama dengan etiket, "Etika" berarti "moral" dan "Etiket" berarti "sopan santun". Etika berkaitan dengan nilai, norma, dan moral. Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai dan pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi nilai itu hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. (Suseno, 1987). Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia. (Kattsoff, 1986)

Banyak pengamat politik berpandangan sinis: "Berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun." "Etika politik itu nonsens". Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara. Dalam konteks ini, bagaimana etika politik bisa berbicara ?.

## **URGensi ETIKA POLITIK**

Kalau orang menuntut keadilan, berpihak pada korban, memberdayakan masyarakat melalui *civil society*, membangun demokrasi, bukanlah semua itu merupakan upaya mewujudkan etika politik? Dalam situasi kacau, bukankah etika politik menjadi makin relevan. Pertama, betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi *indignation* (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu ke etika politik. Seringnya pernyataan "perubahan harus konstitusional", menunjukkan etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil (Ricoeur, 1990). Definisi etika politik membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain...; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan..., ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. "Hidup baik bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan kongkret kebebasan atau disebut *democratic liberties*: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Dalam definisi Ricoeur, etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja, tetapi terkait dengan tindakan kolektif (etika sosial). Dalam etika individual, kalau orang mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan dalam etika politik, yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warganegara karena menyangkut tindakan kolektif. Maka hubungan antara pandangan hidup seseorang dengan tindakan kolektif tidak langsung, membutuhkan perantara. Perantara ini berfungsi menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan kolektif. Perantara itu bisa berupa simbol-simbol maupun nilai-nilai: simbol-simbol agama, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan sebagainya. Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai itu, politikus berusaha meyakinkan sebanyak mungkin warganegara agar menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Maka politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, dan kekerasan. Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.

Tuntutan pertama etika politik adalah "hidup baik bersama dan untuk orang lain". Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warganegara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral. Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dimengerti

sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila ada pengakuan timbal balik dan hubungan fair di antara para pelaku. Pemahaman etika politik semacam ini belum mencukupi karena sudah puas bila diidentikkan dengan kualitas moral politikus. Belum mencukupi karena tidak berbeda dengan pernyataan. "Bila setiap politikus jujur, maka Indonesia akan makmur". Dari sudut koherensi, pernyataan ini sah, tidak terbantahkan. Tetapi dari teori korespondensi, pernyataan hipotesis itu terlalu jauh dari kenyataan (*hipotetis irealis*).

Etika politik, yang hanya puas dengan koherensi norma-normanya dan tidak memperhitungkan real politic, cenderung mandul. Namun bukankah real politic, seperti dikatakan Machiavelli, adalah hubungan kekuasaan atau pertarungan kekuatan? Masyarakat bukan terdiri dari individu-individu subyek hukum, tetapi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang saling berlawanan. Politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apa pun caranya. Filsuf Italia ini yakin tidak ada hukum kecuali kekuatan yang dapat memaksanya. Hanya sesudahnya, hukum dan hak akan melegitimasi kekuatan itu. Situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran Machiavelli itu. Politik dan moral menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi tidak relevan. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil.

### **ETIKA POLITIK BAGI KADER PARTAI POLITIK**

Etika politik merupakan hal yang penting karena, menyangkut tata cara dalam tindakan politik. Etika politik sangat dibutuhkan untuk memelihara keharmonisan dalam pergaulan politik. Suatu tindakan politik yang tidak etis akan mengganggu keharmonisan politik. Serta tidak adanya etika dalam tindakan politik, bukan saja menjadikan sopan santun hilang dari tingkah laku berpolitik, tetapi juga dapat menciptakan keadaan menjadi tidak tertib bahkan secara internal dalam partai politik tertentu akan melahirkan polarisasi bahkan bisa menciptakan dualisme atau kepengurusan ganda dalam partai politik.

Salah tidaknya atau benar tidaknya tindakan politik yang dilakukan aktivis partai politik didasarkan pada etika politik. Sehubungan dengan etika politik ini, Hoffe membedakan antara tiga tingkatan kriteria bagi betul salahnya tindakan politik.

1. Kita menemukan prinsip-prinsip moral dasar, misalnya prinsip keadilan.
2. Prinsip bahwa kekuasaan harus di legitimasikan secara demokratis
3. Menyangkut kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi.

Kalau kekuasaan dalam kepemimpinan partai politik tidak legitimate dan tidak demokratis, akan menimbulkan reaksi yang menimbulkan tingkah laku atau tindakan politik bisa menjadi tidak etis. Muncul persoalan dalam etika politik kalau ada permasalahan. Tidak mungkin etika

politik dipersoalkan kalau tidak ada masalah. Etika harus bertolak dari medan permasalahan. Tingkah laku politik yang dilakukan oleh sebagian aktivis partai politik yang terkadang tidak etis disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Reaksi terhadap proses demokratisasi yang tidak sehat, baik dalam suatu rezim maupun dalam partai politiknya sendiri.
2. Karena ambisi dan haus kekuasaan, kemungkinan lain, ingin mencegah orang lain atau lawan politik menjadi pimpinan partai politiknya.

### **NASIHAT POLITIK UNTUK WAKIL RAKYAT**

Pemilu untuk memilih anggota legislatif telah berlalu. Seperti diduga sebelumnya, partai sekular tetap menduduki peringkat pertama, yang berarti sekedar pengulangan belaka atas apa yang terjadi dalam pemilu 2009, dan tahun 2019 akan datang juga akan dilakukan pemilihan. Memang, ada lonjakan yang luar biasa dari salah satu parpol Islam, namun parpol Islam yang lain sebaliknya malah mengalami penurunan yang cukup besar. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah sebatas perpindahan pilihan dari pemilih parpol Islam yang satu ke parpol Islam lainnya. Kalau ini benar terjadi, berarti sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar dalam pandangan masyarakat terhadap parpol Islam. Catatan penting lain, para pengamat melihat beberapa ‘kemajuan’ dari parpol Islam, antara lain tidak lagi menggunakan ayat dalam kampanye, bahkan sangat sedikit yang mengangkat isu syariat sebagai isu kampanyenya. Yang lebih menonjol adalah isu-isu moralitas dan isu-isu parsial seperti pemberantasan KKN. Artinya, akhir-akhir ini parpol – parpol Islam semakin mengalami deideologisasi. Deideologisasi parpol Islam tentu bukanlah sesuatu yang menggembirakan kita. Sebab, hal ini menunjukkan bahwa parpol Islam semakin jauh dari tanggung jawab utamanya untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah dan menyeluruh. Padahal, kita membutuhkan kesadaran masyarakat.

Rasulullah saw. Pada awal-awal dakwahnya di Makkah tidak mendapat sambutan yang baik dari Masyarakat. Rasulullah dicela dengan berbagai julukan : tukang sihir, pemecah belah, orang gila, dan dan berbagai julukan merendahkan lainnya. Akan tetapi Rasulullah tidak mengubah seruannya pada Islam. Rasulullah juga tidak mengurangi sedikitpun wahyu Allah swt., tapi menyampaikan kebenaran Islam apa adanya. Beliau secara gamblang menyampaikan ayat-ayat Allah yang mencela Abu Lahab yang pada waktu ialah pemimpin kafir Quraisy.

Dalam kesempatan lain beliau secara gamblang menjelaskan wahyu Allah yang mencela orang-orang yang curang dalam tukar takar menakar. Beliau juga berupaya sekuat tenaga menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran Islam, menjelaskan kesalahpahaman mereka tentang Islam dan menjelaskan keburukan sistem hukum. Inilah jalan yang wajib diikuti oleh partai Islam menjelaskan syariat Islam, menerangkan kekhawatiran mereka tentang syariat dan menjelaskan syariat sebagai solusi. Pentingnya penerapan syariat Islam dalam bingkai Daulah

khilafah harus disampaikan apa adanya tanpa peduli celaan orang lain. Itulah yang bisa membuat ummat sadar.

Logika sederhana tentang kekuatan suara mayoritas tidaklah benar. Sebab, walaupun parpol Islam mayoritas di parlemen, mereka tidak akan gampang mengubah hukum menjadi hukum Islam. Apalagi kalau rakyat memilih mereka bukan karena dukungan terhadap syariah. Jika ini terjadi, ketika mereka berupaya memberlakukan syariat Islam bisa-bisa mereka dianggap mengkhianati rakyat. Apalagi, tanpa dukungan dari militer, upaya parpol Islam akan gagal. Apa yang terjadi di Aljazair dan Turki seharusnya menjadi pelajaran untuk ummat. Karena itu ada dua agenda penting yang harus dilakukan pertama : membangun kesadaran ummat tentang syariat sehingga mereka mendukung dan menuntut penerapannya. Kedua : mencari dukungan ahlul quwwa terutama militer. Karena itu kepada semua anggota legislatif tugas adalah menyerukan syariat Islam secara terbuka, mengkritik kebijakan yang bertentangan dengan Islam serta menyatakan ketidaksetujuan terhadap sisten kufur. Perlu disampaikan sejak awal bahwa akan sulit menyelesaikan persoalan masyarakat jika tidak berdasarkan Islam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Pendidikan dalam pandangan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur serta sistematis untuk mensukseskan misi penciptaan manusia sebagai *abdullah* dan *khalifah* Allah di muka bumi. *Kedua*, Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Jadi, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika tidak sama dengan etiket, “Etika” berarti “moral” dan “Etiket” berarti “sopan santun. *Ketiga*, Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. *Keempat*, Suatu tindakan politik yang tidak etis akan mengganggu keharmonisan politik. Serta tidak adanya etika dalam tindakan politik, bukan saja menjadikan sopan santun hilang dari tingkah laku berpolitik, tetapi juga dapat menciptakan keadaan menjadi tidak tertib bahkan secara internal dalam partai politik tertentu akan melahirkan polarisasi bahkan bisa menciptakan dualisme atau kepengurusan ganda dalam partai politik. *Kelima*, Hanya dengan penerapan syariat secara kaffa oleh negara akan terwujud Islam sebagai rahmat bagi seluruh Alam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Maarif, Ahmad Syafii, 1996, *Keutuhan dan Kebersamaan dalam Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wawasan Pendidikan Muhammadiyah*, Makalah pada Rakernas Pendidikan Muhammadiyah di Pondok Gede, Jakarta.



Haryatmoko, 2008 "*Etika Politik, Bukan Hanya Moralitas Politikus*" pengajar filsafat di Pascasarjana UI, Universitas Sanata Dharma, dan IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta.

Yusanto, Muhammad Ismail, 2001 "*Menggagas Kembali Konsep Sistem Pendidikan Islam*", Thariqu Izzah :Bandung.

Suyata, 1992, *Penataan Kembali Pendidikan Islam pada Era Kemajuan Ilmu dan Teknologi*, UNISIA No. 12 Th. XIII, UII, Yogyakarta.

al-Wa'ie : Media Politik dan Dakwah "Pemilu dan perubahan", No. 45 Tahun IV, 1-31 Mei 2004.

Ricoeur, Paul, 1990 "*Urgensi etika politik*" from : internet, <http://www.etika-politik.com>.  
<http://wizanies.blogspot.com/2007/08/akhlak-etika-moral.html>

Tobroni dan En. Asyraf Isyraqi, *Peranan Pendidikan Agama Dalam Pembentukan Etika Sosial Persaudaraan Dan Perdamaian (Studi di Malaysia dan Indonesia)*  
[ejournal.umm.ac.id/index.php/progresiva/article/download/2053/2158](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/progresiva/article/download/2053/2158)